

## NILAI PRAKSIS PANCASILA SEBAGAI MODAL PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ERA *SOCIETY 4.0* DALAM RANGKA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Anouphone Inthaly<sup>1\*</sup>, Hikmat Zakky Almubaroq<sup>2</sup>

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jawa Barat, Indonesia

\*aninthaly16@gmail.com

### *Abstract*

*Pancasila has the nature of basic values which are the essence of the five precepts. The five precepts include values regarding the One Godhead, humanity, unity, democracy, and justice. The nature of Pancasila is universal, in other words, ideals, goals, and good and true values are contained in Pancasila as a basic value. Pancasila is classified as a philosophy, a view of life, and in a practical sense. Philosophy of Pancasila has a function and role as a guide and guide in attitudes, behaviour and actions in everyday life, in the life order of the nation, society and state for the Indonesian people. The value of Pancasila praxis is used as the basic capital in the development of human resources in the era of society 4.0 which must have a view of life and behaviour that is strong and has character in facing increasingly complex challenges. This paper was written using a qualitative method with a literature study approach that looks at the practical value of Pancasila as the basic capital for developing human resources in the era of society 4.0 in supporting national defence by using the theory of Pancasila philosophy and human resource development.*

**Keywords:** *Pancasila, human resource, national defense*

### **Abstrak**

Pancasila memiliki sifat nilai dasar yang dimana hakikat dari kelima sila. Kelima sila tersebut antara lain nilai nilai mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sifat dari Pancasila yaitu universal, dengan kata lain, cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan bena terkandung dalam Pancasila sebagai nilai dasar. Pancasila digolongkan sebagai filsafat, pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tatanan hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Nilai praksis pancasila digunakan sebagai modal dasar dalam pembangunan sumber daya manusia di era *society 4.0* dimana harus memiliki pandangan hidup dan perilaku yang kuat dan berkarakter dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tulisan ini ditulis dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang melihat bagaimana nilai praksis pancasila sebagai modal dasar pengembangan sumber daya manusia di era *society 4.0* dalam mendukung pertahanan Negara dengan menggunakan teori filsafat Pancasila dan pengembangan SDM.

**Kata kunci:** Pancasila, sumber daya manusia, pertahanan negara



## PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar filosofis bagi keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, sebagai landasan filosofis bangsa, berjanji untuk menggabungkan keragaman bangsa Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat dan berdaulat. Pancasila harus mampu memperkuat kerangka nasional sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan ketentuan hukum lainnya. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, UU No 10 Tahun 2004, dan UU No. 12 Tahun 2011 adalah upaya nasional untuk mempertegas Pancasila falsafah nasional. Ketetapan MPRS, Ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan berdasarkan butir-butir yang terkandung dalam Pancasila (Darusman, 2018).

Pancasila memiliki sifat nilai dasar yang di mana hakikat dari kelima sila. Kelima sila tersebut antara lain nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sifat dari Pancasila yaitu universal, dengan kata lain, cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar terkandung dalam Pancasila sebagai nilai dasar. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi Indonesia tentunya juga berasal dari Pancasila. Ideologi tersebut dapat dilihat dari konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945.

Pembukaan dari Undang Undang Dasar 1945 termaktub nilai nilai Pancasila yang menjadi ideologi negara. Selain itu, Undang Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjadikannya memiliki kedudukan yang fundamental. Selain memiliki nilai dasar, Pancasila juga memiliki nilai instrumental. Nilai instrumental tersebut adalah arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan juga lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini adalah kelanjutan dari nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental menjabarkan lebih lanjut tentang kelima butir nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contoh dari nilai instrumental ini salah satunya adalah dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman namun tetap menjadikan Pancasila sebagai acuan pembuatannya. Nilai terakhir yaitu nilai praksis Pancasila. Nilai ini adalah perilaku masyarakat yang berasal dari nilai instrumental yang telah disebutkan sebelumnya. Nilai ini bersifat nyata dan dilakukan sehari hari dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti dalam nilai instrumental, nilai praksis Pancasila ini mengikuti perkembangan zaman dan juga dilakukan berdasarkan nilai dasar Pancasila.

Pada konteks diatas, penulis lebih memusatkan penelitian ini terhadap nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila umumnya adalah lanjutan dari nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila. Nilai Praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari hari. Sebagai lanjutan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, nilai praksis ini memiliki sifat perwujudan dari kedua nilai sebelumnya. Makna nilai-nilai dari sila Pancasila, yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Pada sila pertama ini menekankan kepada masyarakat Indonesia berhak menganut kepercayaan masing-masing, sehingga tidak ada paksaan dari pihak lain. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini mencakup nilai religius yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, serta hubungan negara dengan agama. Nilai kedua dalam butir Pancasila yaitu nilai Kemanusiaan. Nilai tersebut mengingatkan kita semua yang sama-sama manusia dan tidak melupakan jati diri sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Selanjutnya adalah nilai Persatuan. Sebagai negara yang ada karena adanya semangat ingin bersatu, nilai ini

mengajarkan bahwa persatuan ini sangat penting. Semangat ingin bersatu ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang utuh, dengan berbagai suku, ras, dan agama. Keempat adalah nilai Musyawarah. Sebagai negara demokrasi, negara ini mengambil keputusan membutuhkan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dilakukan untuk menjaga hubungan antar manusia dan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tidak terjadi pertikaian dan juga untuk meningkatkan kepercayaan antar sesama. Terakhir yaitu nilai Keadilan. Dalam sila Pancasila yang kelima, Negara Indonesia harus bisa menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya memberikan sebuah hak dan kewajiban sesuai orangnya bukan dilihat dari siapa golongannya.

Pada belakangan ini kata *industry 4.0* menjadi topik pembicaraan oleh banyak orang terutama para muda-mudi Indonesia. Istilah *industry 4.0* pertama kali digunakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011 oleh pemerintah Jerman dengan maksud memajukan bidang industri dengan menggunakan bantuan teknologi (Bauer, Hämmerle, Schlund, & Vocke, 2015). Revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem *Artificial Intellegent* (AI) dalam industri. Pada *industry 4.0* ini, para pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem *fisik-cyber*, *Internet of Things* (IoT), dan *Internet of Systems* memungkinkan adanya *industry 4.0* berjalan dengan baik (Cahyono, 2018; Özkeser, 2019).

Di Indonesia, perkembangan *industry 4.0* didorong oleh Kementerian Perindustrian. Menteri perindustrian mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia *online* pada aktivitas produksi di dunia industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menyebutkan, sejumlah sektor industri nasional telah siap memasuki era *industry 4.0*. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Tetapi tidak hanya dalam teknologi banyak hal yang berubah, manusia dan masyarakat juga berubah.

Dampak perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perilaku masyarakat ekonomi, khususnya pada kegiatan *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* sangat mendominasi di Indonesia. Per-Maret 2019, Indonesia memiliki 30 juta orang yang menjadi pelaku *e-commerce*. Selain itu masyarakat menjadi lebih bergantung kepada teknologi (Mumtaha & Khoiri, 2019). Dengan ketergantungan teknologi ini menciptakan *society 4.0* yang menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Anak-anak pada era *industry 4.0* lebih pandai mencari peluang melalui teknologi dan lebih inovatif dalam memaksimalkan teknologi. Namun, mereka kebanyakan menjadi acuh terhadap banyak hal yang ada di sekitarnya bahkan ada pepatah anak zaman sekarang bahwa teknologi dapat mendekatkan yang jauh juga menjauhkan yang dekat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Strauss & Corbin (1998) adalah studi yang temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk komputasi lainnya. Pendekatan kualitatif ini memberikan detail yang rumit dari fenomena yang sulit dijelaskan secara kuantitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pencarian makna

di balik realitas empiris dari realitas sosial yang ada. Penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode di mana datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata kata baik tertulis maupun lisan.

Teknik pengumpulan data yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) karena penulis menggunakan jenis data sekunder. Data-data yang digunakan dalam penelitian kajian pustaka antara lain adalah informasi-informasi yang termuat dalam buku, jurnal, artikel, berita dan laporan-laporan terpercaya yang berkaitan dengan kasus penelitian penulis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis secara sistematis dengan mencari data sebanyak banyaknya yang kemudian data-data tersebut diseleksi oleh penulis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Analisa data menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan untuk seseorang peneliti dalam penelitian. Tanpa adanya data, penelitian hanya akan berisikan data tanpa memiliki arti. Menurut Anggito & Setiawan (2018) analisa data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Filsafat Pancasila

Pancasila diklasifikasikan sebagai filsafat, pandangan hidup dan makna praktis. Filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional terhadap realitas budaya bangsa, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendasar dan menyeluruh tentang nilai-nilai dan falsafat yang dapat dijadikan dasar negara. Falsafah Pancasila mempunyai peran membimbing dan membimbing dalam sikap, perilaku, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bernegara, bermasyarakat, dan tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Abdulgani (1989), Pancasila adalah falsafah nasional yang lahir sebagai ideologi kolektif seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam terhadap jiwa para pendahulunya. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia terdiri dari lima sila, satu kesatuan yang mutlak. Rasa ingin tahu manusia yang tiada habisnya, terutama hasil pemikiran berupa falsafah Pancasila, dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Filsafat Pancasila diukur dengan keberadaan kebenaran yang beragam dan bertingkat, yaitu: kebenaran indrawi, kebenaran ilmiah, kebenaran filosofis, dan kebenaran agama. Kebenaran Indra menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memang ada dan eksis dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai budaya dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang heterogen.

Kebenaran ilmiah memberikan penegasan bahwa manusia Indonesia mampu mempertanggungjawabkan semua yang diucapkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diyakini sebagai nilai yang paling benar. Kebenaran filosofis adalah kebenaran yang bertumpu kepada esensi dari hidup yang lebih mengutamakan harkat dan martabat manusia yang berorientasi kepada nama harum, nama baik sebagai bangsa Indonesia di tengah kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, baik bersifat kelompok maupun perorangan.

Kebenaran religius menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sungguh sangat mengandalkan dan berfokus kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai soko guru hidup bangsa Indonesia yang berarti mengakui adanya kebenaran mutlak atau kebenaran absolut yang berupa dogma dalam ajaran setiap agama. Untuk meyakinkan bahwa Pancasila itu adalah ajaran filsafat sebagaimana yang disampaikan oleh Moh. Yamin bahwa Pancasila tersusun secara sistematis dan harmonis bersifat integral dan hierarkis saling menjiwai dan dijiwai antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nilai-nilai Pancasila tersebut ada di dalam diri setiap insan manusia Indonesia, sehingga menjadi bagian yang utuh yang tak terpisahkan dalam diri manusia. Dengan kata lain nilai-nilai Pancasila bukan berada di luar diri manusia, melainkan ada dan dimiliki oleh setiap manusia Indonesia dalam dirinya.

### **Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah proses pengembangan dan pelepasan kompetensi profesional dengan tujuan meningkatkan kinerja melalui pengembangan organisasi dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. HRD didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi adalah entitas buatan manusia yang mengandalkan keahlian manusia untuk menetapkan dan mencapai tujuan mereka, dan bahwa profesional SDM adalah advokat untuk individu dan kelompok, proses kerja, dan integritas organisasi. Beberapa model HRD mendefinisikan seperangkat praktik yang, jika diadopsi, kemungkinan berkontribusi pada modal yang dikumpulkan oleh manusia melalui mana organisasi dapat membangun keunggulan kompetitifnya. Model-model ini pada dasarnya mendukung investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan organisasi yang berkontribusi pada kinerja organisasi dan individu, seperti kinerja tinggi, pemecahan masalah individu dan organisasi yang berkualitas tinggi, komitmen organisasi yang lebih tinggi, dan peningkatan retensi organisasi.

Pengembangan juga berarti upaya untuk meningkatkan teknik, teori, konsep melalui pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan, untuk menumbuhkan kualitas moral karyawan. Pelatihan digunakan untuk menutup kesenjangan antara keterampilan SDM dan keahlian dan tuntutan pekerjaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja SDM untuk mencapai tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan. Departemen pengembangan bekerja keras untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk tanggung jawab pekerjaan di masa depan. Pengembangan biasanya diberikan kepada SDM secara selektif dalam persiapan pengisian lowongan untuk mempersiapkan SDM yang dipromosikan ke posisi/jabatan yang disiapkan sesuai dengan sistem karir yang berlaku di masing-masing organisasi atau industri.

Ruang Lingkup Pengembangan SDM Menurut Hasibuan et al. (2021), jenis pengembangan terbagi menjadi pengembangan secara informal dan formal. Pertama, pengembangan secara informal, adalah karyawan atas kemauan dan usahanya sendiri melatih serta meningkatkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang terdapat hubungannya dengan pekerjaan ataupun jabatannya. Kedua, pengembangan secara resmi, ialah karyawan maupun pegawai ditugaskan organisasi buat menjajaki pembelajaran ataupun latihan, baik yang dicoba oleh organisasi ataupun yang dilaksanakan oleh lembaga- lembaga pembelajaran ataupun pelatihan.

Ditinjau dari masa penerapannya, pelatihan selaku bagian dari tugas pengembangan, Sedarmayanti (2007) mengemukakan ruang lingkup pengembangan

SDM meliputi pertama, *pre service training* (pelatihan pratugas) merupakan pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang hendak mulai bekerja, atau karyawan yang baru akan dilakukan pembekalan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas yang hendak dibebankan kepada mereka. Kedua, *in service training* (pelatihan dalam tugas), merupakan pelatihan dalam tugas yang dicoba buat karyawan yang lagi bertugas dalam organisasi dengan tujuan tingkatkan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan. Ketiga, *post service training* (pelatihan purna/pasca tugas) merupakan pelatihan yang dilaksanakan organisasi buat menolong serta mempersiapkan karyawan dalam mengalami pensiun, misalnya pelatihan wirausaha.

### Nilai Praksis Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Perkembangan Era *Society 4.0*

Di era globalisasi ini, Indonesia dihadapkan pada dua ideologi besar dunia yang saat ini terus berkembang, liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat dan sosialisme yang dianut oleh negara-negara komunis. Perkembangan ideologi kapitalis dengan liberalisme ditunjukkan dengan kuatnya tarikan pasar bebas dan investasi asing di Indonesia. Begitu pula dengan ideologi komunis yang menganut paham sosialisme. Pada kenyataannya, sosialisme juga menggunakan pola yang serupa dengan pola yang diterapkan oleh liberalisme, dengan mengandalkan pasar bebas dalam perdagangan dunia dan menerapkan *prepotency of power* terhadap negara-negara berkembang.

Di Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai visi hidup bangsa dan negara untuk menghadapi segala ancaman globalisasi, termasuk globalisasi ekonomi. Penanaman Pancasila sebagai visi hidup bangsa Indonesia menjadi filtrasi terhadap pengaruh proses globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi, dengan memberikan pedoman dan mengaktualisasikan setiap nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi asas-asas hukum dalam menetapkan setiap peraturan dalam perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dunia mengalami perubahan yang sangat cepat yang dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Revolusi ini merubah proses produksi dengan penggunaan internet, robot, hingga penggunaan *Artificial Intellegent* atau sering disingkat AI. Dalam perubahan yang sangat cepat, peran masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga lainnya juga berubah dengan cepat. Mereka perlu berubah untuk beradaptasi dan bertahan dari tekanan hidup.

Untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mampu bersaing dalam skala global, kita tidak punya pilihan selain mengembangkan sumber daya manusia (PSDM) yang berkualitas dan efektif. Masyarakat harus cerdas, kompeten, memiliki keterampilan manajemen sumber daya manusia, memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar dan memimpin organisasi pembelajar, mampu menciptakan sumber daya manusia dan bekerja dengan orang lain atas dasar yang sama, tidak bertindak seperti mereka (Sunarto, 2020).

Nilai Pancasila merupakan nilai dasar bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspek. Menurut Rianto (2016b, 2016a) Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan perwujudan nilai-nilai budaya dan kebiasaan seluruh rakyat Indonesia, sehingga nilai Pancasila ini harus selalu diamalkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Selain menanamkan budi pekerti yang baik pada setiap orang, penerapan nilai-nilai Pancasila

juga merupakan upaya untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, menanamkan kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Diantara nilai-nilai Pancasila terdapat nilai-nilai kehidupan seperti ketuhanan, kemanusiaan, kehidupan yang beradab dan bermoral, kerja sama, gotong royong, toleransi, kasih sayang, empati, kebijaksanaan dalam segala hal, dan kepemimpinan yang adil. Jika semua poin dalam nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan pada setiap warga negara, Indonesia mampu bersaing pada zaman *industry 4.0* seperti pada saat ini.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi dapat dengan mudah diakses. Apapun berita atau informasi terbaru yang ingin kita ketahui, kita dapat mengetahuinya dalam hitungan detik dan dengan beberapa sentuhan di perangkat kita. Saat mencari informasi ini, muncul informasi baru yang menggugah rasa ingin tahu kita. Jadi kami menjelajahi dan menemukan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kemudian sebelum kita menyadarinya, kita menerapkan apa yang selama ini kita cari dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa disadari, kita menerapkan hal yang salah atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama bagi calon pendidik (Hastangka & Ma'ruf, 2021). Sikap dan kebiasaan negara lain yang terpapar pada generasi muda secara tidak langsung mendorong generasi ini untuk mempraktekkan kebiasaan tersebut. Terakhir, kebiasaan orang asing dianggap biasa oleh generasi muda. Hal ini membuat generasi muda lupa, meninggalkan nilai-nilai pancasila yang dipupuk oleh para pendidik sebelumnya. Rasa nilai yang menjadikan Pancasila sebagai ciri khas negara ini harus mulai diterapkan pada generasi muda.

Menghadapi era Revolusi Industri 4.0, dunia pendidikan harus bertindak sekarang dan cepat untuk merespon perubahan yang terjadi. Nilai-nilai Pancasila era revolusi 4.0 dapat dicapai melalui *soft skill*. *Soft skill* dibagi menjadi tiga jenis: kepribadian, konsep diri, dan sikap mental (Arliman, 2021; Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021; Sakinah & Dewi, 2021). Sebelum era revolusi industri 4.0, generasi muda dan masyarakat membutuhkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan kualitasnya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila untuk memajukan bangsa Indonesia (Arliman, 2021). Raharja (2019) mencontohkan ada tujuh unsur *soft skill* yang dibutuhkan untuk mendidik generasi muda, yaitu: keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir dan pemecahan masalah, keterampilan kerja tim, keterampilan manajemen informasi dan belajar sepanjang hayat, keterampilan pengelolaan informasi, etika, dan profesionalisme dan kepemimpinan.

Pertama adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan suatu gagasan, pesan atau gagasan kepada orang lain atau individu secara jelas dan mudah. Dalam komunikasi yang baik, diperlukan pelatihan keterampilan agar efektif dan bermanfaat untuk memungkinkan seseorang mewujudkan ide menciptakan keterampilan yang lebih baik dan bermanfaat. Kedua adalah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir tentang satu atau lebih ide dalam suatu masalah untuk membuat keputusan yang akurat untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses di mana seseorang dapat memecahkan masalah segera sampai masalah benar-benar terpecahkan. Pemecahan masalah mengacu pada kemampuan individu atau individu untuk berpikir atau membuat keputusan selama proses berpikir, untuk memecahkan masalah dengan segera.

Ketiga, kemampuan bekerja dalam tim. Kemampuan ini ditujukan agar terjalin sebuah kerjasama dengan baik. Sebuah tim dapat terdiri dari beberapa orang yang memiliki keterampilan berbeda tetapi dapat bekerja sama dengan baik dalam kepemimpinan. Tim dapat bekerja sama, saling bergantung, mencapai tujuan bersama, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, kerja tim lebih baik daripada pemikiran individu. Kemudian perlunya meningkatkan pembelajaran jangka panjang dan keterampilan manajemen informasi. Tujuannya adalah untuk menjadi pribadi yang kreatif dan peka yang dapat berkembang dan berperan aktif dalam proses pembangunan untuk kepentingan publik.

Keempat, keterampilan manajemen informasi. Hal ini terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, mencari informasi yang relevan, dan menilai suatu informasi yang diperlukan, serta menggunakan informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan spesifik. Informasi yang didapat akan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Lalu ada pula profesionalisme yang didefinisikan sebagai dasar keterampilan klinis, keterampilan komunikasi, etika dan pemahaman hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip profesionalisme, termasuk keunggulan, humanisme, akuntabilitas, dan altruisme. Profesionalisme merupakan ketepatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar adalah suatu hal penting dalam profesionalisme. Kompetensi dan cara mencapai sebuah tujuan didapatkan dan dilakukan dengan benar dan tepat. Etika dan moral merupakan salah satu unsur *soft-skill* yang perlu diterapkan dan terkait dengan nilai Pancasila. Etika berarti kebiasaan, adat istiadat, akhlak, karakter, dan cara berpikir seseorang yang bertindak dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan moral lebih mengarah kepada suatu pengajaran, patokan, himbauan dan peraturan. Meski begitu, etika dan moral sangat erat hubungannya. Memiliki etika yang baik adalah salah satu contoh perwujudan dari nilai Pancasila pada sila kedua. Tingkah laku seseorang dalam bersikap diatur dalam Pancasila, untuk selalu bersikap sopan santun dan menjadi manusia yang beradab.

Terakhir adalah *Leadership*. Nilai-nilai Pancasila lainnya juga termasuk dalam *soft-skill* yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau memimpin suatu kegiatan, atau sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk mengatur bawahannya guna mencapai suatu tujuan bersama. Pemimpin harus mampu mengatasi permasalahan yang ada untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan tertib. Pemimpin harus mampu mengatasi masalah yang ada untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan untuk bekerja sama dan memberikan motivasi dan semangat kepada anggota yang dipimpinya untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu menjelaskan dan mengatur apa yang harus dilakukan bawahan, yang mau mendengarkan dan memahami anggotanya atau kemampuan untuk berunding, dan yang mampu membujuk pihak yang berkepentingan tentang apa yang sedang dibicarakan untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, memiliki keterampilan berbicara di depan umum yang baik dan berkualitas menjadi hal yang sangat diperlukan. Pedoman menjadi pemimpin harapan bangsa diberikan dalam pelajaran Pancasila pada sila Keempat. Artinya, kita dapat memiliki kearifan, menyimpulkan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan umum, serta memberikan hal-hal baru terhadap peristiwa sekitar.

Menurut Aristin (2016), Solusi terhadap permasalahan bangsa terkait dengan aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu dengan melalui pendidikan formal dan Pendidikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Melalui pendidikan formal antara lain melalui pendidikan kewarganegaraan. Penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan bukan hanya mata pelajaran wajib di tingkat sekolah, melainkan mata pelajaran yang wajib diajarkan di setiap perguruan tinggi di Indonesia (Nurgiansah, 2019; Nurgiansah & Rachman, 2022; Rachman et al., 2021). Pencapaian nilai-nilai Pancasila tidak lebih dari kesediaan untuk saling menerima keunikan masing-masing, dan oleh karena itu kesediaan untuk menghargai dan mendukung kebhinekaan bangsa, serta selalu menata kehidupan bangsa Indonesia secara inklusif. Kemudian, pendidikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan pemerintah yang memberi contoh agar masyarakat tidak hanyut dalam tindakan dan perilaku kemanusiaan (Hardoko, 2019; Nurgiansah, Hendri, & Khoerudin, 2021). Pada dasarnya semua aturan tidak ada gunanya tanpa adanya contoh. Contoh yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan terus menerus dalam waktu yang lama, dan dapat diterima oleh banyak orang dan masyarakat. Mengembangkan kesadaran publik terhadap segala bentuk informasi yang masuk supaya dapat disaring. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah tolak ukur dari peradaban suatu negara, namun menghormati kehidupan setiap orang dan semua hak yang diperoleh merupakan tolak ukur peradaban dari suatu negara. Melakukan adanya konsultasi tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila agar landasan dan ideologi bangsa Indonesia dilakukan untuk memberi pengertian dan penjelasan lebih dalam mengenai ideologi dan landasan Pancasila bahwasannya Pancasila tidaklah seperti ideologi Liberalisme maupun ideologi Sosialisme-Komunisme.

## SIMPULAN

Di era Revolusi 4.0, Indonesia akan melihat perubahan besar dalam setiap aspek kehidupan. Terutama teknologi. Segala sesuatu yang dilakukan akan berhubungan dengan kemajuan teknologi modern, internet dan pikiran manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda mulai dari sekarang. Karena bukan tidak mungkin, semakin maju teknologi, semakin mudah berselancar di dunia maya, dan semakin luasnya budaya dan adat asing masuk ke Indonesia, membuat masyarakat Indonesia khususnya generasi muda melupakan nilai-nilai keindonesiaan yaitu Pancasila. Generasi muda masa depan cenderung memiliki karakter kebebasan, ketidakpedulian dan individualisme. Salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah membiasakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang menjadi nilai karakter yang baik bagi generasi muda seperti kepemimpinan, moralitas dan etika, serta lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut dapat membangun karakter generasi muda dan memperkuat adat dan budaya generasi muda agar sejalan dengan Pancasila.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian hingga publikasi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga buah karya sederhana ini bermanfaat bagi setiap orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. (1989). *The Bandung Connection*. Jakarta: Gunung Agung.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aristin, R. (2016). Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Era Reformasi. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 27–36. Diambil dari [http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal\\_aspirasi/article/view/39/24](http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aspirasi/article/view/39/24)
- Arliman, L. (2021). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 333–339. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.647>
- Bauer, W., Hämmerle, M., Schlund, S., & Vocke, C. (2015). Transforming to a Hyper-connected Society and Economy – Towards an “Industry 4.0.” *Procedia Manufacturing*, 3, 417–424. <https://doi.org/10.1016/J.PROMFG.2015.07.200>
- Cahyono, E. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Organisasi Pemerintah. Diambil 31 Agustus 2022, dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia website: <https://setkab.go.id/revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah/>
- Darusman, Y. M. (2018). Pancasila As The Fundamental Norm In The Unity State Of The Republic Of Indonesia (The Theortically Study Legal Hierarchy by Hans Nawiasky). *Internatonal Conference on Social Humanities, Economics, and Law*, 1–14. Universitas Andalas.
- Hardoko, A. (2019). *Pendidikan Moral Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. Malang: Elang Mas.
- Hasibuan, A., Sari, A. P., Simarmata, N. I. P., Harizahayu, H., Estiani, E., Muadzah, M., ... Napitu, R. (2021). *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hastangka, H., & Ma'ruf, M. (2021). Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 115–129. <https://doi.org/10.24114/JK.V18I2.23538>
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
- Mumtaha, H. A., & Khoiri, H. A. (2019). Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce). *JURNAL PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik*, 4(2), 55–60. <https://doi.org/10.33319/piltek.v4i2.39>
- Nurgiansah, T. H. (2019). Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. In A. Wahyudi, R. Nababan, & F. Rachman (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; Digital Library, 15 Oktober 2019* (hal. 95–102). Diambil dari <http://digilib.unimed.ac.id/37502/>

- Nurgiansah, T. H., Hendri, H., & Khoerudin, C. M. (2021). Role Playing dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 56. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22597>
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Özkeser, S. C. (2019). *Cities of Post-politics: Depoliticization of Urban Politics in the Context of Istanbul's Oega-projects*. Middle East Technical University.
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Raharja, H. Y. (2019). Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0 di Pendidikan Tinggi Vokasi. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.30871/DECA.V2I1.1311>
- Rianto, H. (2016a). Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab di Lingkungan Sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(1), 80–91. <https://doi.org/10.31571/SOSIAL.V3I1.268>
- Rianto, H. (2016b). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Bagi Pengembangan Kemandirian Peserta Didik Di SMA. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 14(1), 23–29. Diambil dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/SosioReligi/article/view/5560>
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152–167. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1432>
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd edn. In *Management Learning* (2 ed.). <https://doi.org/10.1177/1350507600314007>
- Sunarto, A. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Berbasis Inovasi untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 397–407. <https://doi.org/10.54783/MEA.V4I2.504>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.